

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
STRUKTURAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PADA DESA JAKE)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Pada Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh:

**MIFTA HULJANNAH
NPM. 220411046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal: 14
Bulan : September
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SARJAN M, S.Sos, M.Si
NIDN. 100128002

SEKRETARIS


Sahri Muharam, S.Sos, M.Si
NIDN. 1021117906

- 1 Dr.DESRIADI, S.Sos, M.Si (Pembimbing 1)
- 2 RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si (Anggota/Penguji 1)
- 3 ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si (Anggota/Penguji 2)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Sarjan M, S.Sos, M.Si
NIDN. 100128002

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN
KEMISKINAN STRUKTURAL OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PADA DESA JAKE)
NAMA : MIFTA HULJANNAH
NPM : 220411046
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr.DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : MIFTA HULJANNAH

NPM : 220411046

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari dapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



MOTTO

“Percayalah, Allah tidak pernah menyalakan usaha hamba-Nya”

(QS. At-Taubah: 105)

“Don’t tell people about your dream, but show them

(Lalisa Manoban)

“Jangan takut kalau doa mu terlalu besar karena yang kamu ajak bicara bukan manusia”

(Someone)

“No matter what you’re feeling I hope you know that you’re allowed to feel that way you don’t have to force yourself to get over something right away you’re allowed to sit in your pain, your frustration whatever it maybe because you’re only human”

(Joshua Seventeen)

“Saat mengalami kesulitan setidaknya sekali sehari, lihatlah langit dan rasakan kebahagiaan tidak peduli apakah itu hujan atau tidak peduli apakah itu panas, karena itu adalah perasaan yang hanya bisa dirasakan saat itu”.

(Choi Seung-cheol)

Skripsi ini adalah bukti dari setiap ketekunan dan kesabaran yang penulis lalui

Cause the one who always gonna proud of myself it's myself, me and i

KATA PERSEMBAHAN

Pertama penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama yang paling utama, kepada Allah SWT. Terimakasih atas setiap takdir yang engkau tuliskan dalam hidupku, baik yang membahagiakan maupun yang menguatkan. Dalam setiap lelah, dalam setiap tangis yang tak terdengar oleh manusia, engkau selalu ada, menjadi tempat kembali, tempat bersandar, dan sumber kekuatan yang tak pernah habis.

2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Bujang Suma dan Ibu Yetti Murni

Skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang yang menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Ayah Bujang Suma dan Ama Yetti Murni, terima kasih atas cinta yang tidak pernah habis, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun. Terima kasih telah menjadi tempat saya pulang ketika dunia terasa berat, menjadi penguat ketika saya mulai lelah, dan menjadi alasan saya untuk tidak menyerah. Mungkin saya tidak selalu

mampu mengungkapkan betapa berartinya kalian bagi saya. Namun, setiap langkah yang saya tempuh hingga hari ini tidak pernah terlepas dari doa dan perjuangan kalian. Jika hari ini saya dapat berdiri dan menyelesaikan pendidikan ini, ada dua tangan yang selalu mendoakan saya dari belakang. Ayah dan ibu, gelar ini bukan hanya milik saya. Di dalamnya ada doa, air mata, perjuangan, dan pengorbanan kalian. Terima kasih telah mempercayai saya untuk sampai sejauh ini. Semoga suatu hari nanti saya dapat menjadi seseorang yang mampu membuat kalian bangga dan membalas, walaupun tidak akan pernah sebanding, segala kebaikan yang telah kalian berikan.

3. Untuk Abang Tercinta, Sarnofri, Kakak Ipar Yusneti, serta Keponakan Tersayang, Shaqueena Humaira dan Sahreena Azzahra

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih atas perhatian, dukungan, doa, dan kehangatan yang selalu diberikan kepada saya. Untuk ibu saya Sarnofri dan Kak Yusneti, terima kasih telah menjadi sosok keluarga yang selalu memberikan dukungan dengan caranya masing-masing. Dan untuk kedua keponakanku tersayang, Shaqueena Humaira dan Sahreena Azzahra, terima kasih telah menjadi warna dan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Senyum dan tingkah kalian sering kali menjadi penyemangat di tengah rasa lelah yang saya rasakan. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan selalu dikelilingi kebaikan.

4. Untuk Kakak Tercinta, Sonya Amelia dan Abang Ipar Ardiansyah

Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan doa yang telah diberikan selama perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga yang selalu memberikan semangat di saat saya membutuhkan. Setiap dukungan yang diberikan mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi saya memiliki arti yang begitu besar. Semoga kebaikan dan kasih sayang yang diberikan aa dan abang kepada saya selalu kembali kepada kalian dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat ganda.

5. Untuk Sahabat-Sahabat Selama Perkuliahan

Wahyu Aira Lestari, Afdelia Salina Rusdi, Rivi Kania, Miranda Meira Yola, dan Julika Deyanti. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita panjang selama masa perkuliahan. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, keluh kesah, diskusi, perjuangan, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Terima kasih telah hadir bukan hanya pada saat semuanya terasa mudah, tetapi juga pada saat perkuliahan terasa melelahkan dan perjalanan menyelesaikan skripsi terasa begitu panjang. Kalian telah membuat perjalanan ini menjadi lebih berwarna dan meninggalkan kenangan yang akan selalu saya ingat. Semoga setelah perjalanan ini kita memiliki jalan masing-masing untuk mengejar cita-cita, tetapi kenangan tentang masa-masa yang kita lalui bersama tidak pernah menjadi asing. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya menuju gelar ini.

6. Untuk Diriku Sendiri

Terakhir, persembahkan ini saya tujukan untuk diri saya sendiri.

Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan ketika lelah, tetap mencoba ketika ragu, tetap melangkah ketika perjalanan terasa panjang, dan tetap percaya bahwa semua perjuangan ini akan menemukan akhirnya. Untuk diriku yang pernah menangis diam-diam, merasa tertinggal, meragukan kemampuan sendiri, dan bertanya apakah semua ini akan selesai—lihatlah, akhirnya kamu sampai di titik ini. Tidak semua hari mudah, tidak semua proses berjalan sesuai harapan, dan tidak semua perjuangan terlihat oleh orang lain. Namun, kamu berhasil melewati semuanya satu per satu. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kamu pernah berjuang sekuat tenaga untuk sebuah impian. Maka, jangan pernah lupa pada dirimu yang hari ini berhasil sampai di garis akhir. Semoga setelah ini kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, dan tidak mudah menyerah pada keadaan.

Terima kasih sudah bertahan.

Terima kasih sudah berjuang.

Dan terima kasih karena tidak menyerah pada diri sendiri.

“Pada akhirnya, setiap perjuangan akan menemukan waktunya untuk menjadi sebuah cerita. Dan hari ini, saya memilih untuk tersenyum, karena perjalanan panjang yang pernah terasa begitu berat akhirnya sampai pada satu titik yang dulu hanya berani saya impikan.”

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN STRUKTURAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PADA DESA JAKE)

MIFTA HULJANNAH

220411046

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan struktural yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dengan studi kasus pada Desa Jake. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah penduduk miskin di Desa Jake meskipun berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan telah dijalankan. Di lapangan juga ditemukan adanya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah daerah yang menilai program telah berjalan optimal, dengan pandangan masyarakat penerima manfaat yang menilai bahwa kebijakan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan kemiskinan struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan sarana ekonomi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melihat sejauh mana kebijakan penanganan kemiskinan struktural telah diimplementasikan secara efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung dengan pihak terkait yaitu dinas sosial, Pemerintah Desa Jake serta Masyarakat. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui triangulasi sumber. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake dapat dikategorikan cukup baik, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan. Program yang dilaksanakan telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan akses program, serta keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, Peneliti berharap peningkatan kualitas program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, penguatan koordinasi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa, peningkatan ketepatan serta pemerataan program, pengembangan akses terhadap lapangan kerja dan peluang ekonomi, serta penguatan program yang berkelanjutan agar penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan Struktural, Desa Jake,

ABSTRACT

EVALUATING THE STRUCTURAL POVERTY ALLEVIATION POLICY IMPLEMENTED BY THE SOCIAL AFFAIRS OFFICE OF KUANTAN SINGINGI REGENCY: A CASE STUDY OF JAKE VILLAGE

MIFTA HULJANNAH
220411046

This study aims to evaluate the effectiveness of the policy for addressing structural poverty implemented by the Social Services Agency of Kuantan Singingi Regency, with a case study in Jake Village. This research is motivated by the relatively high number of poor residents in Jake Village despite the implementation of various social assistance and community empowerment programs. Field findings also indicate differences in perceptions between the local government, which considers the programs to have been implemented optimally, and beneficiary communities, who perceive that the policies have not fully addressed the root causes of structural poverty, such as limited access to education, employment opportunities, and economic facilities. This condition highlights the need to examine the extent to which the policy for addressing structural poverty has been effectively implemented. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews and direct observations involving relevant parties, namely the Social Services Agency, the Jake Village Government, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with data validity ensured through source triangulation. The results of the study indicate that the implementation of the policy for addressing structural poverty in Jake Village can be categorized as fairly good, although it has not yet fully addressed the root causes of poverty in a sustainable manner. The programs implemented have provided benefits in helping to meet the basic needs of poor communities; however, limitations remain in terms of economic empowerment, capacity building, expansion of employment opportunities, equitable access to programs, and the sustainability of benefits received by the community. Therefore, the researcher recommends improving the quality of programs with greater emphasis on community empowerment and self-reliance, strengthening coordination between the Social Services Agency and the village government, improving the accuracy and equitable distribution of programs, expanding access to employment opportunities and economic prospects, and strengthening sustainable programs so that efforts to address structural poverty in Jake Village can be implemented more effectively and optimally while reducing community dependence on social assistance.

Keywords: Policy Evaluation, Structural Poverty, Jake Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan. Proposal ini disusun sebagai langkah awal untuk mengkaji secara mendalam ***“Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)”***. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S-1).

Dalam proses penyusunannya, penulis berusaha menyajikan kajian yang relevan dan sistematis terkait evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan Desa Jake sebagai lokasi studi kasus dilakukan karena desa tersebut memiliki dinamika sosial-ekonomi yang menarik untuk dikaji, terutama menyangkut kondisi kemiskinan struktural yang masih membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

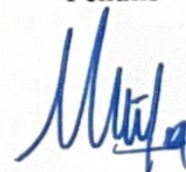
1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Bapak Sarjan M, Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh jajarannya;

3. Bapak Alsar Andri,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara;
4. Bapak Dr.Desriadi,S.Sos.,M.Si selaku selaku dosen pembimbing I dan dosen pemimbing akademik yang penuh ketulusan dan keikhlasan dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa dan ilmu baru serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Sahri Muharam S.sos., M.Si selaku pembimbing II yang juga telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, doa dan ilmu baru serta telah bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Untuk kedua orang tua saya yang selama ini selalu membimbing serta mengarahkan kearah yang lebih baik,dan telah memberikan dukungan moril serta pengorbanan materi selama ini dengan sabar mengajari di setiap tahapan kehidupan. Untuk setiap kasih sayang yang diberikan, terimakasih untuk semua keluarga penulis yang sudah mendukung;

Kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Teluk Kuantan, 13 Juni 2026

Penulis



Mifta Huljannah
NPM.22041146

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori/Konsep kebijakan Publik.....	13
2.1.2.1 Teori/konsep Formulasi Kebijakan Publik.....	17
2.1.2.2 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan Publik	21
2.1.2.3 Teori/Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	25
2.1.3 Teori/Konsep Pemerintah Daerah.....	25
2.1.4 Teori/Konsep Kesejahteraan Sosial	28
2.1.5 Teori Kemiskinan.....	30
2.1.5.1 Teori/Konsep Kemiskinan Struktural.....	39
2.1.6 Penelitian Terdahulu	42
2.2 Kerangka Pemikiran	47
2.3 Hipotesa Kerja	47

2.4 Definisi Operasional	48
2.5 Operasional Variabel	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Informan	53
3.3 Sumber Data	54
3.3.1 Data Primer	54
3.3.2 Data Sekunder	55
3.4 Fokus penelitian	56
3.5 Lokasi Penelitian	56
3.6 Metode pengumpulan Data.....	57
3.6.1 Wawancara	57
3.6.2 Observasi	58
3.6.3 Studi Dokumentasi	58
3.6.4 Triangulasi.....	58
3.7 Analisis Data.....	59
3.7.1 Reduksi Data (Data Reduction)	59
3.7.2 Penyajian Data (Data Display)	60
3.7.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and verification)	60
3.8 Jadwal Kegiatan penelitian	62
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	63
4.1 Sejarah Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1 Struktur Pemerintahan Desa Jake	66
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial	66
4.2.1 Visi Dan Misi.....	68
4.2.2 UNIT KERJA	72
4.2.3 Struktur Organisasi	76
BAB VI PENUTUP	133
6.1 Kesimpulan.....	133
6.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Masyarakat Miskin Desa Jake tahun 2025	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan.....	42
Tabel 2.2 Indikator Evaluasi Menurut Para Pakar	45
Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Desa Jake)”	54
Tabel 3.2 Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake).....	62
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Jake	65
Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 5.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Umur	78
Tabel 5.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)	47
Gambar 4.1 Sturktur Pemerintahan Desa Jake.....	66
Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas Ssoial kabupaten Kuantan Singingi....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara
- Lampiran 4 Surat Permohonan Riset
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 6 Catatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian
- Lampiran 8 Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di Provinsi Riau menggambarkan kompleksitas tersebut. Kuansing resmi dibentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, dengan ibu kota di Teluk Kuantan. Luas wilayah Kuansing mencapai 7.656,03 km², menjadikannya kabupaten dengan luas geografis signifikan. Secara administratif, Kuansing terbagi menjadi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa.

Dari segi demografi, estimasi jumlah penduduk Kuansing pada 2024 mencapai $\pm$ 365.989 jiwa. Namun demikian, hanya sebagian kecil dari penduduk memiliki akses pendidikan tinggi data per Desember 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,16% penduduk telah menyelesaikan pendidikan tertiar. Hal ini menunjukkan tantangan dalam hal kualitas sumber daya manusia, yang kemudian terkait dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan dengan keterampilan lebih tinggi atau peluang ekonomi produktif.

Dari aspek geografis dan ekonomi, karakter wilayah Kuansing relatif agraris dan berorientasi pada sektor perkebunan serta pertanian jenis tanah dan penggunaan lahan memungkinkan tanaman seperti karet, sawit, dan tanaman pangan. Namun kenyataannya, transformasi ekonomi dan diversifikasi pekerjaan tampaknya belum optimal, sehingga banyak masyarakat tetap berada dalam kondisi berisiko kemiskinan struktural: akses terbatas ke pasar, rendahnya

produktivitas, keterbatasan modal, serta minimnya pendidikan dan keterampilan sebagai modal meningkatkan pendapatan.

Menurut (Aryanti & Sukardi, 2024 ; 117) Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial paling kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perbaikan setelah melewati masa pemulihan pasca pandemi, persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan yang membutuhkan penanganan yang komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap konteks lokal. Kemiskinan tidak sekadar dipahami sebagai kondisi kekurangan pendapatan, tetapi mencakup ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, serta akses terhadap kesempatan ekonomi. Tantangan pengentasan kemiskinan semakin berat karena sifatnya yang multidimensi dan seringkali melekat pada struktur sosial masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menghambat produktivitas dan daya saing daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan subsidi, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat daerah.

Menurut (Rohman et al., 2021 ; 71) Salah satu bentuk kemiskinan yang mendapat perhatian khusus dalam berbagai kajian kebijakan sosial adalah kemiskinan struktural. Berbeda dengan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang terjadi akibat guncangan ekonomi atau situasi darurat, kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang berlangsung lama, turun-temurun, dan disebabkan oleh faktor-faktor mendasar yang melekat pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya keterampilan kerja, terbatasnya kepemilikan lahan atau aset produktif, rendahnya diversifikasi pekerjaan, ketidakmampuan mengakses layanan publik, lemahnya jaringan pasar lokal, hingga ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok rentan. Karena sifatnya yang kronis dan sistemik, penanganan kemiskinan struktural membutuhkan strategi kebijakan yang integratif dan tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Di sinilah peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, menjadi penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan memastikan bahwa intervensi kebijakan tepat sasaran serta mampu menysasar akar persoalannya.

Dalam konteks Provinsi Riau, persoalan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif namun cenderung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 6,36%, mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini menempatkan Riau sedikit lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lain di

Sumatera. Namun, angka kemiskinan tingkat provinsi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di tingkat kabupaten/kota. Terdapat disparitas yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kabupaten/kota yang memiliki karakter ekonomi yang sangat berbeda. Di antara kabupaten tersebut, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) termasuk daerah yang menghadapi tantangan cukup besar dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada angka 7,89%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Meskipun angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih terjebak dalam kondisi kemiskinan kronis yang sulit diatasi hanya melalui bantuan sosial jangka pendek.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari struktur ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan informal berskala kecil. Keterbatasan akses terhadap pasar, rendahnya produktivitas pertanian, minimnya peluang usaha alternatif, serta terbatasnya fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan turut memperkuat kondisi kemiskinan struktural di daerah ini. Selain itu, beberapa program pemberdayaan yang telah diluncurkan pemerintah daerah belum mampu memberikan dampak signifikan karena berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran, koordinasi yang lemah antar instansi, kurangnya monitoring dan evaluasi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Menurut (Mahatri Gea et al., 2025 ; 341) Dalam konteks inilah, peran Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi menjadi

sangat krusial, karena sebagai instansi teknis mereka memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

Salah satu wilayah yang menjadi representasi fenomena kemiskinan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Jake. Desa Jake merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini termasuk desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar jika dibandingkan dengan desa lain di kecamatan tersebut. Berdasarkan data demografi yang tersedia, Desa Jake memiliki jumlah penduduk sekitar 3.869 jiwa, dengan komposisi 1.989 laki-laki dan 1.880 perempuan. Secara administratif, Desa Jake menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2025 sebagai bagian dari 218 desa penerima Dana Desa di Kuantan Singingi. Total masyarakat kurang mampu yang ada di desa Jake berjumlah 528 jiwa.

Tabel 1.1 Data Masyarakat miskin Desa Jake tahun 2025

Kerentanan Sosial	Jumlah Masyarakat
Jumlah warga yang masuk Desil 1 berdasarkan DT-SEN	410
Jumlah warga yang masuk Desil 2 berdasarkan DT-SEN	518
Jumlah warga yang masuk Desil 3 berdasarkan DT-SEN	533
Jumlah warga yang masuk Desil 4 berdasarkan DT-SEN	485
TOTAL	1.946

Sumber Data : Data Kantor Desa Jake Tahun 2025

Desa Jake juga disebut sebagai wilayah yang strategis dalam arah pembangunan daerah, karena berada dekat dengan kawasan pengembangan ibu kota kabupaten sehingga sering menjadi prioritas dalam agenda penataan ruang dan infrastruktur. Meskipun memiliki posisi strategis dan akses pembangunan, masyarakat Desa Jake masih menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi, terutama terkait keterbatasan lapangan kerja produktif, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, serta kapasitas ekonomi yang belum merata. Kondisi ini menjadikan Desa Jake relevan sebagai lokasi studi dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural, terutama untuk melihat bagaimana program Dinas Sosial dijalankan dan sejauh mana intervensi tersebut mampu menjawab akar persoalan kemiskinan yang bersifat menahun di tingkat desa. Desa ini dipilih sebagai lokasi studi kasus karena berdasarkan observasi awal dan informasi dari aparat desa, ditemukan adanya kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan menahun, meskipun sebagian dari mereka telah menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jake menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor pendapatan, tetapi juga terkait dengan faktor struktural seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, minimnya keterampilan kerja produktif, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, serta kurang optimalnya pengelolaan program-program pemberdayaan. Selain itu, beberapa informasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh Dinas Sosial belum sepenuhnya berjalan maksimal, misalnya dalam hal pembaruan data penerima bantuan,

pendampingan keluarga penerima manfaat, serta integrasi antara bantuan konsumtif dengan program pemberdayaan ekonomi.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan penanganan kemiskinan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Penelitian (Ikhsan et al., 2024 ; 221) misalnya, menemukan bahwa program bantuan sosial belum cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan jika tidak dibarengi dengan strategi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keluarga miskin. Penelitian lain oleh (Sari et al., 2023 ; 37)menyoroti bahwa kualitas pendataan keluarga miskin merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Kuantan Singingi oleh (Wira Hendri & Taufan Iswandi, 2022 ; 43) mengungkapkan bahwa peran Dinas Sosial masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan program bantuan dengan strategi pemberdayaan berkelanjutan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai kondisi kemiskinan dan implementasi kebijakan, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum menelaah lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan, hambatan struktural, serta pengalaman penerima manfaat secara langsung.

Fenomena ini mendasari pentingnya mengevaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural yang diimplementasikan oleh instansi di tingkat kabupaten, terutama Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (selanjutnya: Dinas Sosial Kuansing). Meskipun berbagai program bantuan dan subsidi kemungkinan sudah dijalankan, data empiris menunjukkan bahwa bantuan saja belum cukup untuk

memutus siklus kemiskinan struktural jika tidak disertai intervensi pemberdayaan yang tepat, pendataan yang akurat dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penelitian mengenai **Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Desa Jake)** memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan yang berjalan, tetapi juga mengungkap tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta menawarkan solusi berbasis bukti untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan potret utuh mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik, bagaimana masyarakat merasakan dampaknya, serta apa yang perlu diperbaiki agar kebijakan penanganan kemiskinan benar-benar mampu mengatasi akar persoalan kemiskinan struktural di Desa Jake dan wilayah sejenis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah “ Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengembangan ilmu kebijakan publik memperkaya literatur dan kerangka teoritis dalam studi kebijakan publik, khususnya terkait penanganan masalah sosial seperti kemiskinan struktural. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai siklus kebijakan (formulasi, implementasi, evaluasi) dalam konteks lokal Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menjadi landasan dan masukan konkret untuk perbaikan, penyesuaian, atau bahkan perumusan ulang kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada Desa Jake. Rekomendasi yang dihasilkan membantu pemerintah dalam menyusun program yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan, serta mengalokasikan sumber data secara lebih efisien serta memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang di lapangan. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kemiskinan struktural serta upaya yang telah dilakukan pemerintah. Meskipun tidak secara langsung, manfaat praktis ini adalah peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap hak-hak dasar mereka.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara Terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Dini Ayu Permata Sari et al., 2024 ; 1)

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas – tugasnya tersebut (Nugraha et al., 2022).

Administrasi negara bukan hanya membicarakan aktor –aktor yang melaksanakan fungsi administrasi, tetapi administrasi negara pula meliputi tata cara dan prasyarat yang seluruhnya berusaha memanfaatkan seluruh sumber daya untuk bisa mencapai tujuan sebuah negara. Jadi, dapat diartikan lebih lagi bahwa administrasi negara merupakan sebuah sistem yang menyertakan seluruh unsur

dan sifat – sifat dari sistem pemerintahan agar dapat menggapai tujuan sebuah negara.

Pada dasarnya konsep dari administrasi adalah kerjasama antarindividu atau dengan kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Administrasi Negara merupakan proses untuk merancang, menerapkan, dan mengatur keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi Negara memperhatikan masalah publik yang ada dalam suatu negara, dimana masalah tersebut akan dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang sumber daya manusia, institusi dan ekonomi. Administrasi Negara mengatur dan melaksanakan berbagai tugas kenegaraan oleh aparatur negara atau pemerintah guna memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik. Administrasi Negara memiliki ikatan yang erat dengan sektor swasta maupun perorangan demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam administrasi negara juga memperlihatkan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan memfokuskan pada kebijakan ataupun pelayanan publik agar lebih tanggap dan peka dengan kepentingan sosial masyarakat (S.rizki et al., 2022 ; 71)

Ciri-Ciri Administrasi negara disebutkan (Miftah & Nur Rokhman, 2022 ; 412),sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari.

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia,orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara,baik warga negara ataupun orang asing.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempegunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas

Besar Lingkup Kegiatan Administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagaiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diatur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

2.1.2 Teori/Konsep kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep sentral dalam ilmu administrasi negara dan tata kelola pemerintahan. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Wiska, 2024 ; 199) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik, menjadi infrastruktur dalam pemanfaatan sumber daya publik, serta bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menyelesaikan masalah publik, memberdayakan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, inti dari kebijakan publik adalah adanya orientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Riant Nugroho, salah satu pakar kebijakan publik Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan publik adalah alat komunitas yang dilembagakan untuk mencapai keyakinan sosial tentang kebaikan bersama. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dalam mencapai tujuan tersebut akan memengaruhi kepercayaan sosial masyarakat terhadap pemerintah. Nugroho juga menekankan

bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama, seperti mengutamakan kepentingan publik, tidak mudah diubah, dibuat dengan cara terbaik, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Dalam konteks hukum, Prof. Sudargo Gautama menyoroti bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga penerapannya harus sangat hati-hati dan tidak boleh digunakan secara sembarangan, terutama dalam konteks hukum internasional.

Kebijakan publik di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite politik, sebagaimana yang menyoroti pergeseran orientasi kebijakan dari negara kesejahteraan ke negara kekuasaan, di mana kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh oligarki dan kelompok kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat demokratisasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan reformasi sistem hukum sebagai solusi agar kebijakan publik kembali berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Engkus et al., 2021 ; 39)

Secara keseluruhan, kebijakan publik di Indonesia adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, nilai, dan kepentingan. Definisi kebijakan publik menekankan pada upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya sering dihadapkan pada tantangan politik, budaya, dan tata kelola. Oleh karena itu, penguatan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sensitivitas

budaya menjadi kunci dalam membangun kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan (Wirawan & Tjenreng, 2025 ; 179)

Relevansi teori kebijakan publik dengan penelitian ini adalah terletak pada pentingnya kualitas tata kelola, transparansi, partisipasi masyarakat, dan responsivitas institusi dalam menentukan efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan struktural di tingkat lokal. Teori ini menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain, serta perlunya kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal dan hambatan struktural.

2.1.2.1 Teori/konsep Formulasi Kebijakan Publik

Teori formulasi kebijakan merupakan salah satu fondasi utama dalam studi kebijakan publik, karena pada tahap inilah berbagai masalah sosial yang kompleks diidentifikasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi alternatif solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Formulasi kebijakan tidak hanya sekadar merancang solusi, tetapi juga melibatkan proses analisis mendalam terhadap akar permasalahan, pengumpulan data yang komprehensif, serta perumusan berbagai opsi kebijakan yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, proses formulasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kapasitas birokrasi, serta keterlibatan aktor-aktor lokal dan nasional. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah yang nyata di masyarakat, seperti kemiskinan struktural yang terjadi akibat ketimpangan distribusi sumber daya, akses pendidikan yang terbatas, serta

minimnya peluang ekonomi bagi kelompok rentan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis situasi dengan mengumpulkan data empiris, baik melalui survei, diskusi kelompok terarah (FGD), maupun analisis statistik yang mendalam. Data ini menjadi dasar untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil, misalnya program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau penguatan infrastruktur dasar. Setiap alternatif kemudian dievaluasi berdasarkan kelebihan, kekurangan, kelayakan implementasi, serta dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan (Setiawan & Jamaliah, 2023 ; 39)

Dalam konteks penelitian evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, teori formulasi kebijakan menjadi sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana proses perumusan kebijakan di daerah tersebut telah berjalan secara partisipatif, berbasis data, dan terintegrasi lintas sektor. Penelitian-penelitian terbaru di Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi data, sinergi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat miskin dalam proses perumusan kebijakan agar program yang dihasilkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif harus didasarkan pada optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan pendapatan per kapita, serta pengurangan ketimpangan sosial-

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan infrastruktur dasar (Safitri et al., 2024 ; 33)

Dalam studi tentang penanggulangan kemiskinan di Indonesia, pendekatan berbasis bukti telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas program, misalnya melalui pemetaan klaster kemiskinan, analisis korelasi antara kemiskinan dan infrastruktur, serta pengembangan strategi perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (Az Zakiyyah, 2023; 82)

Akhirnya, teori formulasi kebijakan juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan sebagai bagian integral dari proses kebijakan. Evaluasi tidak hanya dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan, tetapi juga selama proses perumusan untuk memastikan bahwa setiap alternatif yang dipilih benar-benar relevan, efektif, dan dapat diukur dampaknya. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang baik harus bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi, serta mampu memberikan ruang bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pemahaman mendalam tentang teori formulasi kebijakan akan sangat membantu dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan proses perumusan kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

2.1.2.2 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik merupakan salah satu pilar penting dalam studi kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Implementasi

kebijakan publik tidak hanya sekadar menjalankan perintah atau instruksi dari pembuat kebijakan, melainkan merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan melibatkan banyak aktor, institusi, serta faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Secara umum, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan menjadi aksi konkret yang diharapkan mampu menghasilkan perubahan sosial sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Dalam proses ini, berbagai model dan teori telah dikembangkan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan, mulai dari model top-down yang menekankan peran otoritas pusat, model bottom-up yang menyoroti peran pelaksana di tingkat bawah, hingga model hibrida yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut (Andrianus & Alfatih, 2023; 51)

Salah satu teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan enam variabel kunci: kejelasan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik lembaga pelaksana, dukungan lingkungan eksternal, respons kelompok sasaran, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan pada aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta disparitas kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Studi Putra dkk. (2024 ; 42) tentang implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (PSM) di Indonesia menunjukkan bahwa faktor politik menjadi penentu utama keberhasilan implementasi, diikuti oleh faktor birokrasi, manajerial, sumber daya, dan organisasi. Kompleksitas implementasi semakin tinggi karena melibatkan banyak kementerian di tingkat pusat dan 540 pemerintah

daerah, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi sangat krusial. Hal ini sejalan dengan temuan studi lain yang menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan pembentukan tim khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan lintas sektor.

Teori implementasi kebijakan juga menyoroti pentingnya peran aktor pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*), yang memiliki diskresi dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Model *bottom-up* menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan, komitmen, dan kreativitas pelaksana di tingkat lokal, serta sejauh mana mereka dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dalam konteks transformasi digital pelayanan publik di Indonesia, misalnya, model birokrasi hibrida menjadi solusi adaptif untuk mengatasi resistensi ASN terhadap teknologi, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan anggaran, terutama di daerah 3T (*tertinggal, terdepan, dan terluar*). Studi ini merekomendasikan percepatan harmonisasi regulasi, pelatihan berbasis gamifikasi, dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung implementasi kebijakan digital yang inklusif dan berkeadilan (Nomensen Yeheskel Singgir et al., 2025; 120)

Pendekatan *top-down* awalnya mendominasi studi implementasi, namun kemudian pendekatan *bottom-up* berkembang untuk menyoroti adaptasi kebijakan di tingkat lokal dan peran aktor pelaksana yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Upaya integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan model hibrida yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di

berbagai konteks. Teori implementasi kebijakan publik menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur dampak, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara dinamis. Implementasi kebijakan bukanlah proses linear, melainkan siklus yang melibatkan umpan balik (feedback) dari masyarakat dan pelaksana, sehingga kebijakan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang berkembang. Dengan memahami teori implementasi kebijakan secara mendalam, analisis terhadap kebijakan publik di Indonesia dapat dilakukan secara lebih komprehensif, kritis, dan kontekstual, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan di masa depan (Y et al., 2024 ; 233)

Di dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan publik memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah diformulasikan benar-benar dijalankan di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian di Indonesia, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama menurut model Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam kasus di Mataram, Maros, dan Konawe, ditemukan bahwa komunikasi yang tidak efektif antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta struktur birokrasi yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Hal ini juga tercermin dalam penelitian di Kuantan Singingi, di mana Dinas Sosial telah menjalankan berbagai program pendidikan dan perlindungan sosial, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi, serta kurangnya kolaborasi antar lembaga, juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

2.1.2.3 Teori/Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah diimplementasikan secara efektif, efisien, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan struktural, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memahami apa yang telah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Teori evaluasi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Evert Vedung, menekankan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk membedakan antara kebijakan yang bernilai dan yang tidak, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Evaluasi dilakukan dengan menilai implementasi, output, dan outcome dari suatu kebijakan, sehingga dapat diketahui

apakah tujuan kebijakan telah tercapai, sumber daya digunakan secara optimal, dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan harapan (Selepe, 2023 ; 43)

Evaluasi kebijakan publik di Indonesia semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. dalam praktiknya, proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia masih sering terjadi di dalam “black box” yang kurang transparan dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka menemukan bahwa kebijakan publik sering kali dinegosiasikan dan diformulasikan berdasarkan kepentingan tertentu para pembuat kebijakan, sehingga substansi kebijakan kerap kali tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini berdampak pada munculnya institusi yang tidak terkoordinasi dengan baik dan kebijakan yang saling bertentangan, sehingga efektivitas implementasi kebijakan menjadi rendah (Nomensen Yeheskel Singgir et al., 2025 ; 120)

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam evaluasi kebijakan publik adalah teori input-output, di mana evaluasi difokuskan pada hubungan antara alokasi sumber daya (input) dan hasil kebijakan (output). Pendekatan ini sangat relevan dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti yang terlihat dalam studi tentang pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial di Kota Kediri. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana bantuan sosial telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti inefisiensi, kurangnya transparansi, ketidaktepatan sasaran, dan politisasi bantuan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan

dengan pendekatan input-output perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan pengawasan yang ketat agar akuntabilitas dan transparansi dapat terjaga. Selain itu, integrasi sistem informasi berbasis teknologi, pelatihan sumber daya manusia yang terarah, dan restrukturisasi kelembagaan menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial (Gracenda Febina Br Purba et al., 2025 ; 108)

Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai dimensi utama, seperti efektivitas (apakah tujuan kebijakan tercapai), efisiensi (apakah sumber daya digunakan secara optimal), relevansi (apakah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat), dampak (apa perubahan yang dihasilkan, baik yang diharapkan maupun tidak), dan keberlanjutan (apakah manfaat kebijakan dapat dipertahankan dalam jangka panjang). Evaluasi juga harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Relevansi teori dan konsep evaluasi kebijakan publik dengan penelitian ini sangatlah kuat. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi dapat menggunakan berbagai model evaluasi yang telah dijelaskan di atas untuk menilai sejauh mana program penanggulangan kemiskinan telah mencapai tujuannya,

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti. Dengan menggunakan pendekatan input-output, dapat menilai efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, dengan menggunakan model logika dan evaluasi berbasis teori, dapat menganalisis jalur logis pencapaian tujuan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, baik dari sisi proses, aktor, maupun konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat aspek partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam evaluasi kebijakan, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, teori dan konsep evaluasi kebijakan publik tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian, tetapi juga membantu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar mampu mengatasi permasalahan struktural yang dihadapi masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3 Teori/Konsep Pemerintahan Daerah

Konsep dan teori pemerintahan daerah di Indonesia berakar pada prinsip desentralisasi, yang bertujuan memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Secara umum, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip utama yang mendasari pemerintahan daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana desentralisasi menjadi pilar utama yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia telah mengalami dinamika panjang, mulai dari era sentralisasi pada masa Orde Baru hingga reformasi yang menandai era otonomi daerah secara luas sejak tahun 1999. Tujuan utama desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal (Muhtadin, 2023 ; 233)

Namun, implementasi pemerintahan daerah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu isu utama adalah ambiguitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana secara konstitusional daerah diberikan otonomi luas, tetapi dalam praktiknya pemerintah pusat masih memiliki intervensi yang signifikan, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun pengendalian kebijakan strategis nasional. Meskipun konstitusi mengamanatkan

otonomi yang luas, realitas di lapangan menunjukkan adanya dualisme paradigma antara model federalisme dan republik, sehingga otonomi daerah seringkali terhambat oleh campur tangan pusat yang berlebihan. Mereka menegaskan perlunya penegasan batas kewenangan antara pusat dan daerah agar pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan mandiri.

Dari sisi tata kelola, kapasitas pemerintahan daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. (Setiawan dkk. 2022 ; 24) menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah yang meliputi kapasitas analitis, operasional, dan politik sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Ketiga kapasitas ini saling melengkapi dan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Selama ini, kapasitas operasional seperti kemampuan fiskal memang telah menjadi perhatian utama, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas analitis (kemampuan merumuskan kebijakan berbasis data dan analisis) serta kapasitas politik (kemampuan membangun konsensus dan legitimasi) juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan desentralisasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Sayogo dkk. 2023 ; 11) yang menyoroti pentingnya arsitektur data yang baik, budaya data, dan kemampuan analitik dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Namun, tantangan seperti lemahnya regulasi, kurangnya evaluasi kualitas data, serta budaya birokrasi yang masih otoriter menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola berbasis data di pemerintahan daerah.

Teori pemerintah daerah menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk merancang,

mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik lokal. Dalam konteks daerah di Kuantan Singingi, peran pemerintah daerah sangat sentral karena Dinas Sosial bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, termasuk di Desa Jake. efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan sumber daya yang bijak, respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan lokal, serta struktur birokrasi yang mendukung kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan. Studi di Pinogaluman dan Papua menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi merupakan indikator kunci keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jika keempat aspek ini berjalan optimal, maka program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata.

Dalam konteks penelitian mengenai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 memiliki relevansi sebagai salah satu dasar regulasi dalam memahami karakteristik dan kondisi masyarakat miskin yang menjadi sasaran penanganan pemerintah daerah. Indikator yang terdapat dalam peraturan tersebut dapat digunakan untuk melihat berbagai bentuk keterbatasan yang dialami masyarakat, termasuk keterbatasan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, serta akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, regulasi ini dapat menjadi salah satu landasan dalam menganalisis apakah program penanganan kemiskinan yang

dilaksanakan pemerintah daerah telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan.

Dinas Sosial Kuantan Singingi menjadi aktor utama dalam merancang dan menjalankan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar. Penelitian di berbagai daerah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan koordinasi lintas sektor juga ditemukan di banyak daerah, sehingga diperlukan inovasi kebijakan dan penguatan tata kelola agar program benar-benar tepat sasaran.

2.1.4 Teori/Konsep Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial telah menjadi fondasi utama dalam upaya pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kesejahteraan sosial secara umum didefinisikan sebagai kondisi di mana individu dan kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka baik fisik, ekonomi, sosial, maupun psikologis sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurangan ketimpangan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui intervensi negara dan kebijakan sosial yang terstruktur. Dalam konteks global, penelitian-penelitian mutakhir menyoroti bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan

masyarakat, yang semuanya saling terkait dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Nggilu et al., 2022 ; 718)

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian dan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial adalah social protection atau perlindungan sosial. Program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan, terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Studi sistematis di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk program kesejahteraan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Di Brasil, misalnya, program Bolsa Família berhasil menurunkan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan program, ketepatan sasaran, serta perlunya reformasi institusional agar program benar-benar efektif dan inklusif. Di Indonesia, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi, sinergi program, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal (Kuntjorowati et al., 2024 ; 23)

Desain kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Studi di Asia, termasuk Indonesia, menegaskan bahwa efektivitas program kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas kebijakan, alokasi sumber daya yang tepat, serta mekanisme evaluasi yang kuat. Di tingkat daerah, peran pemerintah

lokal sangat krusial dalam memastikan bahwa intervensi sosial benar-benar menjangkau kelompok miskin dan rentan. Penelitian di Sragen, misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan selektif, pendanaan dari APBD, serta distribusi langsung kepada penerima manfaat dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi faktor kunci dalam menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan keberhasilan program kesejahteraan sosial. keberhasilan program kesejahteraan sosial di tingkat lokal sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang adaptif, partisipasi masyarakat, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor kontekstual seperti karakteristik wilayah, kebutuhan spesifik kelompok sasaran, serta tantangan implementasi di lapangan (Daniel LT et al., 2025 ; 108)

2.1.5 Teori Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro;(Syahrul Fauzi et al., 2022 ; 12) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (grand theory), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

1). Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan meruakkan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

2).Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah

mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Lestari et al., 2023 ; 2)

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitinya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal (Fernando & Amar, 2021 ; 43)

Dalam perspektif teori struktural dan eksklusi sosial, kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya seperti pekerjaan, modal usaha, pendidikan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran ketertinggalan karena tidak memiliki modal ekonomi maupun sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini juga diperkuat oleh pemikiran Amartya Sen melalui teori kapabilitas, yang menyatakan bahwa seseorang disebut miskin bukan hanya karena kurang pendapatan, tetapi karena kurangnya kemampuan (capability) untuk menjalani kehidupan yang

layak, produktif, dan bermartabat. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan materi semata, namun harus menyentuh aspek peningkatan kemampuan, akses kesempatan, pemberdayaan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Teori-teori ini sangat relevan untuk melihat fenomena kemiskinan di wilayah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan formal, serta dominasi pekerjaan sektor informal berpenghasilan rendah (Rafa Fauziyah Rohyadi et al., 2024 ; 167).

A. Jenis-Jenis Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika atau rumah tangga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan tersebut antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi, ukuran kemiskinan absolut berfokus pada apakah seseorang mampu mencapai suatu standar minimum kehidupan, bukan pada seberapa kaya atau miskin orang tersebut dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya. Gary S. Fields menjelaskan bahwa pendekatan kemiskinan absolut melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memiliki sumber daya yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam praktiknya, kemiskinan absolut biasanya diukur menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*). Seseorang yang berada di bawah garis tersebut dianggap tidak mampu memenuhi standar kebutuhan minimum yang telah

ditetapkan. World Bank, misalnya, menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara, sementara setiap negara juga dapat memiliki garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Untuk Indonesia, World Bank menjelaskan bahwa garis kemiskinan internasional digunakan untuk perbandingan global, sedangkan garis kemiskinan nasional memiliki tujuan dan konteks kebijakan yang berbeda.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan kondisi ekonomi seseorang dengan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, seseorang dapat disebut miskin bukan hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi karena tingkat pendapatan atau standar hidupnya jauh berada di bawah standar yang berlaku dalam masyarakat. Konsep ini banyak dikaitkan dengan sosiolog Inggris Peter Townsend, yang memandang kemiskinan sebagai bentuk *relative deprivation* atau kekurangan relatif. Townsend menekankan bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh pola hidup, fasilitas, aktivitas, dan standar yang dianggap lazim dalam masyarakatnya.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya struktur atau sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menyebabkan kelompok tertentu terus mengalami keterbatasan kesempatan. Dalam perspektif ini, kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya usaha individu. Faktor seperti akses pendidikan yang tidak merata, kesempatan kerja yang

terbatas, kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang, diskriminasi, ketimpangan pembangunan, serta kebijakan atau institusi yang kurang berpihak dapat membuat seseorang sulit meningkatkan kondisi ekonominya.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang kemiskinan yang melihat bahwa pendapatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesejahteraan. Amartya Sen, misalnya, menjelaskan kemiskinan sebagai kekurangan kemampuan dasar (*capability deprivation*), bukan sekadar rendahnya pendapatan. Seseorang dapat memiliki sedikit sumber daya tetapi juga menghadapi hambatan sosial dan struktural yang membuatnya tidak mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi kehidupan yang layak. Kajian mengenai pendekatan Sen juga menekankan pentingnya melihat kesempatan dan kemampuan nyata seseorang untuk mencapai kondisi hidup yang dianggap bernilai.

4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah konsep yang menjelaskan kemiskinan dari sisi pola perilaku, nilai, kebiasaan, dan cara hidup yang berkembang dalam lingkungan masyarakat miskin. Konsep ini sangat dikenal melalui antropolog Amerika Oscar Lewis. Berdasarkan penelitiannya, Lewis berpendapat bahwa kehidupan dalam kondisi kemiskinan yang berlangsung lama dapat menghasilkan pola perilaku dan nilai tertentu sebagai bentuk adaptasi terhadap keadaan tersebut. Pola tersebut kemudian dapat diwariskan melalui proses sosialisasi dari orang tua kepada anak.

Namun, teori kemiskinan kultural perlu dipahami secara hati-hati karena Konsep Lewis sendiri telah banyak dikritik karena berpotensi membuat masyarakat menyalahkan individu miskin, padahal kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktural. Kajian mengenai teori tersebut menunjukkan bahwa konsep *culture of poverty* memang menggambarkan pola adaptasi terhadap kemiskinan, tetapi juga menimbulkan kritik karena dapat dianggap sebagai bentuk *blaming the victim*.

5. Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan cenderung menetap. Orang atau rumah tangga yang mengalami kemiskinan kronis tidak hanya sesekali berada di bawah garis kemiskinan, tetapi berada dalam kondisi tersebut secara terus-menerus atau dalam periode yang sangat panjang. Kemiskinan seperti ini biasanya lebih sulit diatasi karena berkaitan dengan akumulasi berbagai kekurangan, seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, aset, kesempatan kerja, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya.

Dalam penelitian mengenai kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara, Marco Stampini dan Benjamin Davis menjelaskan bahwa rumah tangga dapat disebut mengalami kemiskinan kronis ketika tingkat konsumsi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang berada di bawah garis kemiskinan. Artinya, kemiskinan tersebut bukan hanya akibat penurunan pendapatan sesaat, tetapi mencerminkan keterbatasan ekonomi yang lebih permanen. Mereka juga

menunjukkan bahwa kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara dapat membutuhkan kebijakan penanggulangan yang berbeda.

6. Kemiskinan Sementara atau Transien

Kemiskinan sementara (*transient poverty*) adalah kemiskinan yang terjadi dalam periode tertentu akibat perubahan atau guncangan ekonomi, tetapi tidak selalu berlangsung dalam jangka panjang. Seseorang yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup dapat tiba-tiba berada di bawah garis kemiskinan karena kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, terkena bencana, mengalami kegagalan usaha, atau menghadapi kenaikan biaya hidup yang signifikan.

Jalan dan Ravallion membedakan kemiskinan sementara dari kemiskinan kronis dengan melihat perubahan konsumsi dari waktu ke waktu. Mereka mendefinisikan *transient poverty* sebagai bagian dari kemiskinan yang berasal dari variabilitas konsumsi, atau dengan kata lain kerentanan seseorang untuk jatuh miskin akibat perubahan kondisi ekonomi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan sementara tidak selalu sama dengan faktor yang menyebabkan kemiskinan kronis, sehingga kebijakan untuk mengatasinya juga dapat berbeda.

7. Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan multidimensi adalah pandangan bahwa kemiskinan tidak dapat diukur hanya berdasarkan pendapatan. Seseorang dapat memiliki pendapatan yang sedikit lebih tinggi daripada garis kemiskinan tetapi tetap mengalami kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih,

sanitasi, listrik, atau aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan multidimensi melihat berbagai bentuk kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga secara bersamaan.

Pendekatan ini sangat berkaitan dengan pemikiran Amartya Sen mengenai *capability deprivation*. Sen berpendapat bahwa kemiskinan seharusnya dilihat sebagai kekurangan kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak, bukan sekadar rendahnya pendapatan. Pendekatan tersebut kemudian berkembang dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. UNDP melalui Global Multidimensional Poverty Index (MPI) mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan sejumlah indikator seperti gizi, kematian anak, lama sekolah, kehadiran sekolah, sanitasi, air minum, listrik, perumahan, bahan bakar memasak, dan kepemilikan aset.

Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Jake, kemiskinan struktural dapat muncul akibat kombinasi faktor geografis, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Masyarakat desa umumnya bergantung pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal yang rentan terhadap fluktuasi harga, iklim, serta minimnya akses permodalan dan teknologi. Kondisi ini akan semakin berat jika kebijakan pemerintah daerah, termasuk program Dinas Sosial, belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat miskin seperti keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya pendidikan, dan lemahnya daya saing ekonomi rumah tangga miskin. Karena itu, kehadiran kebijakan penanganan kemiskinan dari Dinas Sosial sejatinya diharapkan tidak hanya bersifat karitatif atau bantuan sementara, tetapi mendorong kemandirian

melalui pemberdayaan, peningkatan akses, serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural.

2.1.5.1 Teori/Konsep Kemiskinan Struktural

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang telah menjadi perhatian utama dalam kajian pembangunan dan kebijakan publik di seluruh dunia. Secara umum, kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, baik dalam ukuran absolut maupun relatif. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan juga mencerminkan ketidakmampuan untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial yang layak, yang pada akhirnya membatasi partisipasi penuh individu dalam proses pembangunan masyarakat. Konsep kemiskinan berkembang dari sekadar kekurangan pendapatan menjadi pemahaman yang lebih kompleks, mencakup aspek struktur sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya diukur berdasarkan pendapatan, tetapi juga kemampuan (*capability*) individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat, seperti diungkapkan oleh pemikiran Amartya Sen yang menekankan pada kapabilitas sebagai ukuran kemiskinan selain pendapatan semata (Salam et al., 2022 ; 127)

Dari berbagai perspektif teori kemiskinan, dapat dibedakan antara teori individual yang menempatkan faktor penyebab kemiskinan pada individu, dan teori struktural yang menekankan penyebab kemiskinan pada faktor sistemik dan

kontekstual. Teori individual cenderung melihat kemiskinan sebagai akibat dari kekurangan kemampuan, kurangnya motivasi, atau pilihan hidup individu. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi peluang hidup seseorang. Sebaliknya, teori kemiskinan struktural memandang kemiskinan sebagai hasil dari ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial yang menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu untuk memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang (M. Raihan Noer et al., 2025; 184)

Menurut teori struktural, kemiskinan bukan semata akibat kekurangan pribadi, tetapi akibat dari struktur masyarakat yang memperkuat ketimpangan distribusi kekayaan, peluang kerja, pendidikan, dan layanan sosial. Pendekatan ini dipertegas dalam kajian kontemporer yang menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan ketimpangan dalam distribusi peluang dan akses terhadap sumber daya, yang sering kali diperkuat oleh struktur sosial dan fungsional masyarakat.

Teori kemiskinan struktural menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan kebijakan publik memainkan peran penting dalam pembentukan dan reproduksi kemiskinan. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor makro seperti struktur pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan yang tidak adil, keterbatasan infrastruktur, serta akses yang timpang terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan determinan penting dari kemiskinan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan menjadi fenomena sistematik yang tidak dapat dijelaskan hanya dari perspektif individu, melainkan harus dilihat dari dinamika hubungan sosial dan struktur ekonomi yang

lebih luas. Misalnya, ketimpangan akses terhadap pekerjaan formal berpenghasilan layak dapat menciptakan kondisi di mana sebagian besar masyarakat tetap terjebak dalam sektor informal dengan pendapatan rendah. Ketimpangan ini pada gilirannya menjadi bagian dari mekanisme yang mempertahankan kemiskinan secara intergenerasional (Nurfadia et al., 2025 ; 42)

Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman tentang kemiskinan struktural menjadi sangat krusial karena menjelaskan bagaimana struktur sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan atau memperparah kondisi ketidaksetaraan. Teori kemiskinan struktural memperlihatkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif harus melampaui pemberian bantuan materi semata, tetapi juga harus menyentuh akar penyebab sistemik seperti akses pendidikan, peluang kerja layak, ketersediaan infrastruktur, serta distribusi sumber daya yang adil dan merata. Pendekatan ini juga selaras dengan temuan dalam literatur kebijakan sosial yang menyatakan bahwa kebijakan yang hanya bersifat kuratif atau bantuan langsung tanpa mengatasi ketimpangan struktural cenderung gagal membawa perubahan jangka panjang bagi masyarakat miskin. Kebijakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembukaan akses terhadap peluang produktif menjadi sangat penting untuk menjadikan masyarakat mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang bersifat struktural.

Dalam penelitian yang relevan di Indonesia, kajian mengenai fenomena kemiskinan struktural menunjukkan bahwa wilayah pedesaan dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan

cenderung mengalami kemiskinan yang berulang dan sulit diatasi hanya dengan bantuan materi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi peluang dan sumber daya merupakan bagian dari struktur sosial ekonomi yang memperkuat miskinnya suatu wilayah secara sistemik. Kondisi ini diperkuat oleh bukti empiris dalam berbagai kajian yang menunjukkan bahwa kemiskinan struktural terkait erat dengan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat desa.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberikan referensi dalam menulis ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Tujuan peneliti terdahulu adalah mengetahui sejauh mana topik telah diteliti, memperkuat landasan teori dan argumentasi. Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, yang dijadikan acuan dan pembandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul & Fokus	Temuan Utama	Relevansi
1	(Assayid et al., 2025)	Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa	Program pengentasan kemiskinan di desa berjalan, tetapi efektivitasnya	Relevan karena sama-sama mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

No	Peneliti (Tahun)	Judul & Fokus	Temuan Utama	Relevansi
		Panyaungan Kecamatan Cihara	berbeda-beda karena masalah implementasi, pendataan, dan karakteristik sosial ekonomi warga.	
2	(Melati et al., 2025)	Pemerintah Daerah dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Baubau, Indonesia	Program pemerintah daerah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, namun masih terdapat hambatan struktural yang membatasi hasilnya.	Relevan karena menilai peran pemerintah daerah seperti Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan.
3	(Koming & I Wayan Sudemen, 2024)	Pola Intervensi Pemerintah dalam Pengurangan Kemiskinan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia	Bantuan sosial, kredit, dan dana desa efektif mengurangi kemiskinan, namun belanja modal tidak selalu berdampak positif jika tidak tepat sasaran.	Relevan sebagai landasan teori untuk menilai dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap kemiskinan.

Ketiga jurnal tersebut memiliki kontribusi penting dalam memperkuat dasar empiris penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan di tingkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Assayid et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendataan, proses implementasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Temuan ini menjadi rujukan penting bahwa evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan tidak hanya menilai keberadaan

program, tetapi juga harus melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, siapa yang menerima manfaat, serta sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan real masyarakat miskin.

Selanjutnya, penelitian oleh (Melati et al., 2025) menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, khususnya dalam mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan akses ekonomi, kompetensi, dan pelayanan dasar. Meskipun program yang dijalankan pemerintah telah memberikan kontribusi positif, namun hambatan struktural tersebut sering kali membuat hasil program belum optimal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa diperlukan evaluasi kebijakan yang tidak hanya melihat output program, tetapi juga bagaimana kebijakan mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural di daerah.

Sementara itu, penelitian oleh (Komang & I Wayan Sudemen, 2024) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, dana desa, dan program pemberdayaan ekonomi terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa tidak semua bentuk belanja pemerintah berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan apabila tidak dirancang secara tepat sasaran dan kontekstual. Temuan ini memberikan landasan teoritis bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus dirancang berbasis kebutuhan masyarakat dan difokuskan pada peningkatan akses ekonomi kelompok miskin.

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar logis dan empiris untuk menilai bagaimana kebijakan penanganan kemiskinan

struktural yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi berjalan di lapangan, khususnya di Desa Jake. Untuk melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan selama ini sudah efektif, tepat sasaran, dan mampu menyentuh akar persoalan struktural masyarakat miskin, atau justru masih bersifat sementara dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.2 Indikator Evaluasi Menurut Para Pakar

Dunn (2018)	Rossi, Lipsey & Henry (2019)	Subarsono (2016)	Nugroho (2017)	OECD (2020)
Effectiveness (Efektivitas) – sejauh mana tujuan kebijakan tercapai	Program Need Assessment – kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin	Ketepatan Sasaran – siapa yang menerima manfaat	Relevansi Kebijakan – kesesuaian kebijakan dengan masalah yang dihadapi	Relevance – apakah kebijakan menjawab kebutuhan nyata kelompok miskin
Efficiency (Efisiensi) – perbandingan biaya dengan hasil	Program Implementation – kualitas pelaksanaan program di lapangan	Efektivitas – keberhasilan mencapai tujuan	Efektivitas – hasil yang dicapai sesuai sasaran	Effectiveness – capaian hasil kebijakan
Adequacy (Kecukupan) – tingkat kemampuan kebijakan mengurangi masalah	Program Outcomes – perubahan kondisi sosial ekonomi setelah program	Kecukupan – sejauh mana kebijakan memecahkan masalah	Efisiensi – perbandingan input dan output	Efficiency – sumber daya digunakan secara optimal
Equity (Pemerataan) – keadilan distribusi	Program Impact – dampak	Pemerataan – keadilan	Keadilan Sosial – distribusi	Equity – manfaat dirasakan

manfaat kebijakan	langsung maupun tidak langsung	bagi kelompok sasaran	manfaat kepada kelompok lemah	secara adil
Responsiveness (Responsivitas) – sejauh mana kebijakan menanggapi kebutuhan masyarakat	Sustainability – keberlanjutan manfaat program	Responsivitas – daya tanggap pemerintah	Responsivitas Publik – kesesuaian kebijakan dengan aspirasi warga	Sustainability – keberlanjutan hasil program
Appropriateness/Accuracy (Ketepatan) – kesesuaian kebijakan dengan masalah	Cost-Effectiveness – biaya dibandingkan hasil sosial	Ketepatan – kesesuaian kebijakan dengan akar masalah	Kepastian Hukum & Tata Kelola – kejelasan aturan pelaksanaan	Coherence – konsistensi kebijakan dengan program lain
Feasibility (Kelayakan) – apakah kebijakan dapat dilaksanakan	Service Delivery Quality – kualitas layanan kepada penerima manfaat	Efisiensi – hemat sumber daya	Akuntabilitas Publik – pertanggungjawaban program	Impact – perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)



2.3 Hipotesa Kerja

“Dugaan sementara dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan penanganan kemiskinan struktural yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, apabila diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan beban kemiskinan masyarakat di Desa Jake. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap kesempatan

ekonomi, layanan sosial, dan pemberdayaan, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rumah tangga miskin secara berkelanjutan.”

2.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional tidak diartikan dalam bentuk angka atau ukuran kuantitatif, melainkan sebagai penjelasan konseptual yang bertujuan untuk memahami makna dari setiap konsep kunci yang akan ditelusuri secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, definisi operasional ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun instrumen pengumpulan data, menentukan fokus analisis, serta memastikan bahwa proses interpretasi tetap konsisten dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian (N. Lestari et al., 2024 ; 380) Dalam penelitian ini, definisi operasional dieksplorasi melalui indikator evaluasi kebijakan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Effectiveness (Efektivitas Kebijakan)

Efektivitas kebijakan adalah sejauh mana kebijakan penanganan kemiskinan struktural yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi beban kemiskinan masyarakat Desa Jake. Indikator ini mencakup keberhasilan program dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin, ketepatan program dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta perubahan nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dinilai dari pengalaman, persepsi, dan penilaian masyarakat maupun pelaksana program mengenai hasil kebijakan di lapangan.

2. Efficiency (Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan)

Efisiensi kebijakan merujuk pada sejauh mana sumber daya seperti anggaran, tenaga, waktu, dan fasilitas digunakan secara optimal dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Indikator ini melihat apakah pelaksanaan program dilakukan secara tepat guna, tidak boros, serta mampu menghasilkan manfaat yang sebanding atau lebih besar dibandingkan sumber daya yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini, efisiensi dipahami melalui proses pengelolaan program, mekanisme kerja, koordinasi antar pihak, serta pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

3. Adequacy (Kecukupan Manfaat Program)

Kecukupan kebijakan adalah sejauh mana program penanganan kemiskinan struktural mampu memberikan manfaat yang memadai untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Indikator ini menilai apakah bantuan, intervensi, atau program yang dilaksanakan benar-benar cukup untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin, bukan hanya bersifat sementara atau simbolis. Dalam penelitian ini, kecukupan dilihat dari pandangan penerima manfaat mengenai seberapa besar perubahan yang mereka alami setelah mengikuti program.

4. Equity (Keadilan dan Pemerataan Akses Program)

Equity atau pemerataan mengacu pada keadilan distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat miskin tanpa diskriminasi. Indikator ini menilai apakah penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan kriteria kemiskinan yang objektif, apakah pendataan dilakukan secara terbuka, dan apakah kelompok yang paling rentan benar-benar mendapatkan prioritas. Dalam

penelitian ini, pemerataan dipahami melalui pengalaman warga terkait keadilan akses, transparansi data, dan proses penentuan penerima manfaat.

5. Responsiveness (Daya Tanggap Kebijakan terhadap Kebutuhan Masyarakat)

Responsivitas merupakan sejauh mana kebijakan dan pelaksana program mampu memahami, menanggapi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat miskin. Indikator ini meliputi kemampuan Dinas Sosial menerima keluhan, memperbaiki kelemahan program, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jake. Dalam penelitian ini, responsivitas digambarkan melalui interaksi antara masyarakat penerima manfaat dengan aparat pelaksana program di lapangan.

6. Sustainability (Keberlanjutan Dampak Kebijakan)

Keberlanjutan adalah kemampuan kebijakan penanganan kemiskinan struktural untuk memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat. Indikator ini menilai apakah program yang berjalan mampu menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan, serta memperbaiki kondisi hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan dilihat dari sejauh mana perubahan sosial dan ekonomi tetap bertahan setelah program berjalan.

Seluruh indikator ini digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake diimplementasikan, dirasakan, dan dinilai oleh masyarakat serta pihak pelaksana. Fokus penelitian tidak hanya menilai prosedur administratif, tetapi juga menggali makna,

pengalaman, dan dampak nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat kebijakan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.3 Operasional Variabel Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	Efektivitas	a. Penanganan faktor penyebab kemiskinan b. Peningkatan kondisi sosial ekonomi	Ordinal
	Efisiensi	a. Optimalisasi penggunaan sumber daya b. Hambatan penggunaan sumber daya	Ordinal
	Kecukupan	a. Kecukupan program dalam mengatasi kemiskinan b. Pemenuhan kebutuhan dan akses ekonomi	Ordinal
	Pemerataan	a. Pemerataan akses terhadap program b. Hambatan akses masyarakat miskin	Ordinal
	Responsivitas	a. Respons terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat b. Kesesuaian tindak lanjut dengan kebutuhan masyarakat	Ordinal
	Keberlanjutan	a. Keberlanjutan manfaat program b. Kemandirian dan keberlanjutan ekonomi	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana kebijakan penanganan kemiskinan struktural yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi diimplementasikan di Desa Jake, serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini ingin menggali realitas sosial secara langsung melalui pengalaman masyarakat miskin, aparat desa, pendamping sosial, dan pihak Dinas Sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena kemiskinan struktural apa adanya sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Jake, bukan hanya melalui angka statistik formal. Hal ini penting karena kemiskinan struktural tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, jaminan sosial, modal usaha, serta kebijakan pemerintah yang belum optimal.

Pendekatan studi kasus dipilih agar peneliti memperoleh pemahaman holistik mengenai implementasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural dalam satu lokasi tertentu, yaitu Desa Jake sebagai kasus tunggal. Studi kasus membantu peneliti menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” kebijakan

tersebut berjalan efektif atau belum, sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi **research gap** terkait evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan pada level lokal, khususnya yang menekankan pada dimensi struktural seperti akses sumber daya, pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif studi kasus sangat sesuai digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman mendalam dari para informan, menilai implementasi kebijakan secara langsung di lapangan, serta melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Desa Jake.jjjjj

3.2 Informan

Menurut Pahwa et al. (2023 ; 13), informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi penelitian. Informan dibedakan menjadi informan utama, informan kunci, dan informan pendukung. Informan utama adalah pihak yang mengalami langsung kebijakan, informan kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan atau pengetahuan khusus, sedangkan informan pendukung memberikan penjelasan tambahan.

Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Informan terdiri dari:

Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Desa Jake)”

No	Informan	Jumlah Orang	Persentase
1	Dinas Sosial kabupaten Kuantan Singingi	1	100%
2	Kepala Bidang penanganan masyarakat miskin Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	1	100%
3	Pemerintah Desa Jake (Kepala Desa/Perangkat Desa)	2	100%
3	Masyarakat miskin di Desa Jake	1.946	100%

Struktur informan ini dipilih agar penelitian memperoleh gambaran komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan dampak kebijakan penanganan kemiskinan struktural, sekaligus mendukung triangulasi sumber data untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga memberikan gambaran yang nyata mengenai pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pihak

Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah Desa Jake, pendamping sosial, serta masyarakat miskin penerima bantuan sosial.

Melalui pengumpulan data primer ini, peneliti berupaya memahami secara langsung bagaimana kebijakan penanganan kemiskinan struktural diimplementasikan, bagaimana mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan, serta hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Data primer juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait penerimaan bantuan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, data primer menjadi sumber utama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake (Fadli, 2021 ; 33)

3.3.2 Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi tambahan. Data sekunder merupakan data yang telah disusun dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti lembaga pemerintah, organisasi, atau peneliti terdahulu, dan kemudian digunakan kembali sebagai bahan analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen kebijakan penanganan kemiskinan, laporan program Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, data statistik kemiskinan, arsip administrasi Desa Jake, serta artikel ilmiah dan literatur yang relevan terbitan tahun-tahun terbaru (Fadli, 2021 ; 33)

Pemanfaatan data sekunder bertujuan untuk melengkapi temuan lapangan dan memberikan landasan konseptual terhadap analisis penelitian. Melalui data

sekunder, peneliti dapat melihat kesesuaian antara ketentuan kebijakan di tingkat dokumen dengan praktik implementasi di lapangan, serta memahami tren dan pola kemiskinan struktural yang terjadi. Kombinasi antara data primer dan data sekunder diharapkan mampu menghasilkan deskripsi dan analisis yang komprehensif, objektif, dan akurat terkait evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake.

3.4 Fokus penelitian

Fokus Penelitian ini “Mengevaluasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi melalui studi kasus di Desa Jake.”

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, modal usaha, serta dukungan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, Desa Jake juga merupakan salah satu wilayah binaan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendampingan keluarga miskin, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut (Ananda 2022 ; 87), pemilihan lokasi penelitian dalam pendekatan kualitatif harus mempertimbangkan tingkat relevansi fenomena yang diteliti serta potensi lokasi tersebut dalam memberikan data yang kaya dan

mendalam. Oleh karena itu, Desa Jake dinilai tepat untuk dijadikan lokasi penelitian karena mampu merepresentasikan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan struktural pada tingkat lokal, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan tersebut di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

3.6 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi agar diperoleh data yang valid dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta triangulasi data. penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkaya sudut pandang serta memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari lapangan (Fadli, 2021 ; 33)

3.6.1 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pejabat Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat miskin penerima program bantuan. Wawancara dilakukan secara **semi terstruktur**, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk mengemukakan pandangan dan pengalamannya. wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam karena interaksi berlangsung secara fleksibel dan terbuka. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan, ketepatan sasaran program, hambatan pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jake.

3.6.2 Observasi

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi masyarakat miskin, lingkungan permukiman, serta interaksi sosial yang terjadi. Observasi ini penting untuk memahami realitas sosial secara lebih utuh dan alami. Observasi dalam penelitian kualitatif membantu peneliti menangkap aspek-aspek non-verbal, situasional, serta dinamika sosial yang tidak selalu dapat tergali melalui wawancara. Melalui observasi, peneliti juga dapat membandingkan pernyataan informan dengan kondisi nyata di lapangan (N. Lestari et al., 2024 ; 380)

3.6.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung berupa arsip, laporan program, data penerima bantuan, peraturan daerah, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Studi dokumentasi memberikan manfaat penting karena mampu memperkuat dan melengkapi temuan lapangan, sekaligus menjadi bahan pembanding terhadap data hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan objektif.

3.6.4 Triangulasi

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, atau teori yang berbeda guna memperoleh kebenaran informasi secara lebih meyakinkan. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi, sehingga diperoleh konsistensi makna yang dapat dipertanggungjawabkan

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses yang berlangsung secara terus menerus sejak peneliti mulai memasuki lapangan hingga penelitian selesai. Model analisis yang digunakan mengacu pada pandangan yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif mencakup proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data sehingga membentuk temuan penelitian yang bermakna.

3.7.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan agar data yang semula masih mentah, banyak, dan kompleks dapat difokuskan pada informasi yang benar-benar penting untuk dianalisis. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian, seperti implementasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural, mekanisme pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta dampak program terhadap masyarakat miskin di Desa Jake (Fadli, 2021; 33)

Melalui proses reduksi ini, peneliti dapat membedakan mana data yang relevan dan mana yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara terus menerus sejak peneliti mulai turun ke lapangan hingga akhir penelitian, sehingga data yang dianalisis benar-benar terarah pada upaya

mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.

3.7.2 Penyajian Data (Data Display)

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menampilkan informasi secara terstruktur sehingga peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalam data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi tematik mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan, peran Dinas Sosial dan pemerintah desa, pengalaman masyarakat penerima bantuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and verification)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan yang muncul selama penelitian, kemudian diverifikasi kembali untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan penanganan kemiskinan struktural, mencakup ketepatan sasaran program, pelaksanaan di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jake (N. Lestari et al., 2024 ; 38)

Proses verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan kembali kesimpulan dengan data mentah, catatan lapangan, serta hasil triangulasi sumber dan metode. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, tetapi benar-benar didukung oleh data lapangan yang valid dan kredibel. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai implementasi kebijakan penanganan kemiskinan struktural serta menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial dalam menyempurnakan program ke depan. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat membandingkan pandangan antar informan, melihat keterkaitan antar variabel sosial, serta menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan. Tahap ini juga membantu peneliti dalam menentukan pola temuan yang nantinya menjadi dasar penarikan kesimpulan.

3.8 Jadwal Kegiatan penelitian

Tabel 3.2 Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Revisi Proposal																				
6	Pembuatan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Ujian Skripsi																				
9	Revisi Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Desa Jake merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Nama Desa Jake berasal dari nama tumbuhan yang berbentuk seperti daun pandan dengan ciri duri pada sisinya. Pada saat itu tumbuhan yang bernama Jake tersebut mendominasi hampir di seluruh permukaan tanah di sekitar domisili penduduk pada waktu itu. Setelah ada penduduk yang menetap kemudian di tetapkanlah pemukiman penduduk tersebut menjadi perkampungan penduduk yang dikukuhkan oleh Datuk Bisai Dari Teluk Kuantan. Dalam istilah adat bahwa untuk menjadikan sebuah desa, sebuah negeri harus memiliki persyaratan “BA AYAM BA ITIAK, BA SURAU BA MASOJIK”, yang artinya untuk menjadikan sebuah desa tempat tersebut harus memiliki penduduk yang menetap, sudah memiliki ternak sebagai sumber kehidupan dan surau atau mesjid untuk tempat peribadatan. Maka dengan lengkapnya persyaratan adat tersebut maka berdirilah sebuah desa yang dinamakan desa Jake.

Pada awal pemerintahan desa Jake pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1955 desa Jake dipimpin oleh Datuak Paduko Jelelo. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Datuak Johasan Khatib, berikut urutan kepala pemerintahan desa Jake setelah dipimpin oleh Datuak Paduko Jelelo dan Datuak Johasan Khatib.

1. Ghani (1947-1955)
2. Johasan Khatib (1955-1978)

3. Marjohan (1978-1996)
4. H. Yusmedi (1996-2004)
5. Heriwan (2004-2009)
6. Jauzak Azhari (2009-2015)
7. Pjs. Rico Saspegita (2015-2018)
8. Mariantoni J. S. Ag (2018-2024)
9. Alfius. S.Pd., M.M (Sekarang)

DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

- Sebelah Utara : Desa Logas
 Sebelah Selatan : Desa Sei. Jering
 Sebelah Barat : Desa Serosah
 Sebelah Timur : Desa Geringging Baru/Sentajo Raya

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 120 Ha
2. Pertanian Sawah : -
3. Ladang/Tegalan : -
4. Hutan : 426 Ha
5. Rawa-rawa : -
6. Perkantoran : 0,5 Ha
7. Sekolah : 6 Ha
8. Jalan : 65 Km
9. Lapangan Sepak Bola : 1,5 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibukota kecamatan terdekat : 12 KM
2. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan : 20 Menit
3. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 12 KM
4. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 20 Menit

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Jake

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	2.137 jiwa
2	Perempuan	1.978 jiwa
TOTAL		4.115 jiwa

Sumber : Profil Desa Jake

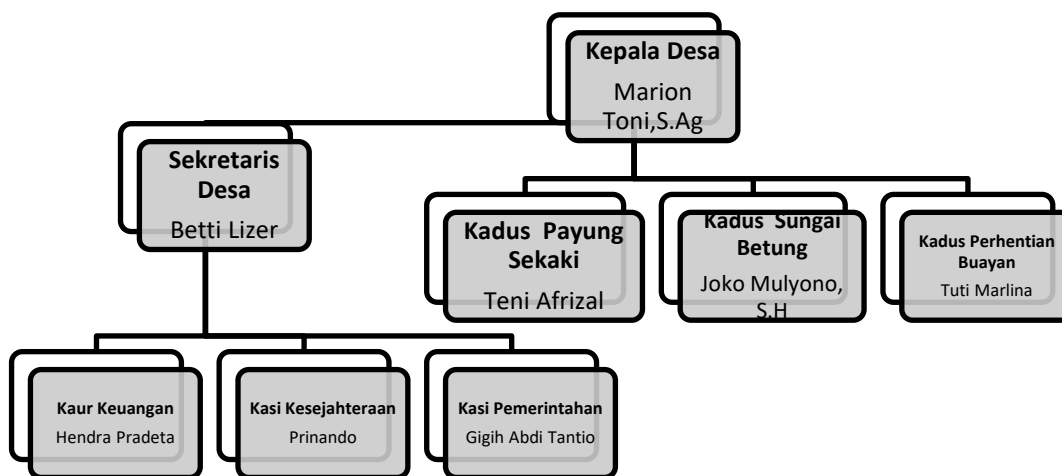
d) Keadaan Ekonomi

Pertanian

1. Padi Sawah : - Ha
2. Jagung : 27 Ha
3. Palawija : 10 Ha
4. Sawit : 900 Ha
5. Karet : 876 Ha
6. Singkong : 30 Ha
7. Lain-lain : -

Masyarakat Desa Jake umumnya terdiri dari suku-suku lokal, dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduk mengandalkan pertanian, dengan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan berbagai sayuran. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat. Desa Jake mencerminkan kehidupan pedesaan di Riau, dengan kekayaan alam dan budaya yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

4.1.1 Struktur Pemerintahan Desa Jake



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Jake

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Keberadaan Dinas Sosial berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menangani permasalahan sosial, memberikan perlindungan sosial, serta melaksanakan berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Sosial memiliki posisi strategis karena permasalahan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, pelaksanaan

kebijakan sosial di tingkat daerah menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengurangi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebelum adanya perubahan struktur perangkat daerah pada tahun 2026, urusan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi berada dalam organisasi yang bernama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kemudian melakukan perubahan struktur perangkat daerah dengan memisahkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi dua perangkat daerah, yaitu Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perubahan kelembagaan tersebut penting untuk diperhatikan dalam penelitian ini karena pelaksanaan program penanganan kemiskinan yang menjadi objek penelitian dapat berlangsung pada periode ketika urusan sosial masih berada dalam struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, penyebutan Dinas Sosial dalam penelitian ini perlu disesuaikan dengan periode kebijakan dan pelaksanaan program yang diteliti.

Dinas Sosial menjadi salah satu perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Pengaturan mengenai kedudukan dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur secara khusus mengenai kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari sisi pelayanan publik, Dinas Sosial memiliki posisi penting sebagai salah satu perangkat daerah yang berhubungan dengan masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai pelayanan dan program sosial yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

4.2.1 Visi Dan Misi

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam berbagai kegiatan dan program sosial dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Kuantan Singingi. Sejalan dengan hal tersebut, Visi Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah : Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. BERBUDAYA mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;

2. RELIGIUS mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. MAJU mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. BERWAWASAN mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. SEJAHTERA mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan

masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. HARMONIS mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

4.2.2 UNIT KERJA

Adapun pembagian unit kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial dan masyarakat desa.

Fungsi Kepala Dinas

Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Tugas Sekretaris

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi Sekretaris

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosia

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial.

Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Sosial
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Desa

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Desa.

Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Desa

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Desa;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Desa;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Desa;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporari kebijakan teknis di bidang Jaminari Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial.

Fungsi Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
- b. koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Desa Jake), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan struktural di Desa Jake termasuk dalam kategori cukup baik. Program yang dilaksanakan telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi akar kemiskinan, terutama dalam aspek pemberdayaan, peningkatan ekonomi, kesempatan kerja, pemerataan akses, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial perlu memperkuat program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Jake perlu meningkatkan pemutakhiran data masyarakat miskin agar program lebih tepat sasaran dan merata.
3. Koordinasi antar pihak terkait perlu ditingkatkan agar program sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa Jake.
4. Pendampingan dan monitoring terhadap penerima program perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan memberikan manfaat jangka

panjang.

5. Pemerintah Desa Jake perlu lebih aktif mendorong masyarakat miskin mengikuti program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
6. Program penanganan kemiskinan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 54–60. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.206>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Assayid, W. S., Hapid TA, A., Lubis, M. A., Sutisna, A., A, S., & Aziz, A. F. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 494–498. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.888>
- Az Zakiyyah, N. A. (2023). Infrastructure and Poverty: State Budget Effect Analysis with Panel Model. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 2(2), 82–94. <https://doi.org/10.12928/jampe.v2i2.7943>
- Daniel LT, O., Yunus, M., Abdullah, M. T., Ibrahim, M. A., & Pauzi, R. (2025). Context Evaluation Of Social Welfare Policy Implementation: A Case Study Of Social Empowerment Programs In North Kalimantan Province. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(9s), 1080–1088. <https://doi.org/10.64252/36vcn513>
- Dini Ayu Permata Sari, Ainul Yaqin, & Imam Sucahyo. (2024). Etika Administrasi Pada Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Oleh Aparatur Di Kantor Desa Tegalorejo Kecamatan Dringu. *Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.55499/intelektual.v11i1.1146>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Engkus, Ainyna Rachmadiany Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fernando, D., & Amar, S. (2021). Hubungan Kausalitas Antara Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(2), 43.

<https://doi.org/10.24036/jkep.v3i2.13602>

- Gracenda Febina Br Purba, Dicky M.C. Sinulingga, Josua Togatorop, & Lokot Muda Harahap. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan : Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>
- Ikhsan, L. R., Priatna, W. B., & Burhanuddin, B. (2024). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 221–238. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i2.1093>
- Komang, E. M., & I Wayan Sudemen. (2024). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 9(1), 68–77. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v9i1.92280>
- Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis (gepeng). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 11–26.
- Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., Suryani, & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty in rural areas through multi-sector partnerships. *Heliyon*, 10(23). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>
- Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(3), 380–388. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v4i3.1848>
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto, S. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4789>
- M. Raihan Noer, M. Deni Damara, Rachel Meylani Situmorang, & Khairani alawiyah matondang. (2025). Pengentasan Kemiskinan Dan Ketidakadilan: Tinjauan Pada Ketimpangan Sosial Ditengah Kemajuan Ekonomi Di Indonesia Melalui Prinsip Ekonomi. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), 184–193. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v13i1.1953>
- Mahatri Gea, Palindungan Lahagu, Syah Abadi Mendrofa, & Nanny Artatina Buulolo. (2025). Analisis Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi

- Pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(1), 341–350. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i1.3861>
- Melati, M., Farid Yusuf Nur Achmad, & Junaid Gazalin. (2025). Peran Pemerintah Kelurahan Kadolomoko Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Baubau. *Journal Publicuho*, 8(3), 1283–1296. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.808>
- Miftah, M., & Nur Rokhman. (2022). Kriteria pemilihan dan prinsip pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK sesuai kebutuhan peserta didik. *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(4), 412–420. <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i4.92>
- Muhtadin, M. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Ahkam*, 2(2), 233–251. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1029>
- Nggilu, R., Katili, A. Y., Rachman, E., & Gobel, L. Van. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 718–725. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.837>
- Nomensen Yeheskel Singgir, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana, & Sri Kamariyah. (2025). Implementasi Kebijakan di Indonesia: Tinjauan Sistematis Tren dan Praktik Terbaru dalam Administrasi Publik dan Tata Kelola. *Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(3), 120–149. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.574>
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausjah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *TEORI ADMINISTRASI*.
- Nurfadia, N., Abdulahanaa, A., & S., A. (2025). Analisis Kemiskinan Struktural Nelayan Etnis Suku Bajo Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v5i1.10844>
- Rafa Fauziyah Rohyadi, Ati Kusumawati, Shahifa Kamila, & Mohammad Raihan Pasya. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 167–173. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.975>
- Rizki, S. A., Misbahrudin, M., Abror, A. U., Hasanah, S., & Putra, R. S. (2022). Peranan Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kelurahan Ngagel Kota Surabaya, Jawa Timur).

- WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains)*, 2(1), 73–81.
<https://doi.org/10.38156/worldview.v2i1.199>
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(1), 71–84.
<https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.709>
- Safitri, A., Rahmawati, R., & Wandira, S. A. (2024). Pengelompokan Data Penduduk Miskin Di Sumatera Utara Menggunakan K-Means. *J-Com (Journal of Computer)*, 4(1), 33–39. <https://doi.org/10.33330/j-com.v4i1.2998>
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di Jawa Timur melalui pendekatan multidimensi dan moneter. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 127.
<https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480>
- Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 8(1), 37.
<https://doi.org/10.26737/jpipsi.v8i1.3978>
- Selepe, M. M. (2023). The evaluation of public policy implementation failures and possible solutions. *EUREKA: Social and Humanities*, 1, 43–53.
<https://doi.org/10.21303/2504-5571.2023.002736>
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 2(5), 399–405. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Syahrul Fauzi, A., Runtiningsih, S., & Hidayat, F. (2022). Determinants of Poverty in Indonesia and its Policy Implications, Multidimensional Approach to Measuring Poverty. *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.70>
- Wira Hendri, & Taufan Iswandi. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(1), 43–50.
<https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.388>
- Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 179–193.
<https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241>

- Wiska, N. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 199–208. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.34243>
- Y, A. M., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Implementasi Tantangan dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Al-DYAS*, 4(1), 233–245. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i1.4437>

LAMPIRAN



Gambar 1: informan atas nama Bapak
Irhandi,S.Sos (Dinsos)



Gambar 2 : Informan atas nama Ibu Betti
Lizer (Perangkat Desa)



Gambar 3 : Informan Atas nama Bapak
Hendra Julianti,S.AB (Perangkat Desa)



Gambar 4 : Informan atas nama Ibu Fitri Rahmadani (Masyarakat miskin Desa Jake)



Gambar 4 : Informan atas nama Ibu Nurliasma (Masyarakat miskin Desa Jake)



Gambar 4 : Informan atas nama Ibu Idayati (Masyarakat miskin Desa Jake)



Gambar 4 : Informan atas nama Ibu Wira Susanti (Masyarakat miskin Desa Jake)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake)

A. Identitas Peneliti

Nama : Mifta Huljannah
NPM : 220411046
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Daftar Pertanyaan

a. Efektivitas

1. Sejauh mana program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial mampu mengatasi tidak hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi juga faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Jake tetap berada dalam kondisi kemiskinan?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Perubahan apa yang dirasakan atau terlihat pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Jake setelah adanya program penanganan kemiskinan, khususnya dalam hal kemampuan memperoleh pendapatan, pekerjaan, keterampilan, atau kemandirian ekonomi?

Berikan Ulasan

.....
.....

.....

b. Efisiensi

1. Se jauh mana penggunaan anggaran,waktu,tenaga dan sumber daya dalam program penanganan kemiskinan telah diarahkan secara tepat untuk mengatasi permasalahan dan faktor penyebab kemiskinan di Desa Jake?

Berikan ulasan

-
-
-
2. Apakah dalam pelaksanaan program masih terdapat kendala yang menyebabkan sumber daya,waktu atau anggaran belum digunakan secara optimal dalam membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan?

Jawab:

.....

c. Kecukupan

1. Apakah program penanganan kemiskinan yang diberikan sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan,bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawab:

-
-
-
2. Menurut Bapak/Ibu, kebutuhan atau faktor apa yang masih belum terpenuhi melalui program penanganan kemiskinan,seperti akses pekerjaan,pendidikan,keterampilan,modal usaha,atau kesempatan ekonomi lainnya?

Jawab:

d. Pemerataan

1. Apakah masyarakat miskin di Desa Jake telah memperoleh akses yang adil dan merata terhadap bantuan, pemberdayaan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, modal usaha, maupun program lainnya yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Apakah masih terdapat masyarakat miskin yang mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam memperoleh program dan kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonominya?

Jawab:

.....
.....
.....

e. Responsivitas

1. Sejauh mana Dinas Sosial dan pemerintah Desa merespons kebutuhan, keluhan, dan hambatan yang dihadapi masyarakat miskin di Desa Jake, terutama yang berkaitan pekerjaan, pendapatan, keterampilan, modal, dan akses terhadap pelayanan?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Bagaimana bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap kebutuhan atau permasalahan masyarakat miskin yang disampaikan, dan sejauh mana tindak lanjut tersebut sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat?

Jawab:

.....
.....
.....

f. Keberlanjutan

1. Sejauh mana program penanganan kemiskinan di Desa Jake mampu memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Apa upaya yang dilakukan atau diperlukan agar masyarakat miskin dapat terus meningkatkan kondisi ekonomi, memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil, dan keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan?

Jawab:

.....
.....
.....

Teluk Kuantan, Agustus 2026
Informan

(.....)



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 298/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
- a. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Mifta Huljannah
NPM : 220411046
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 228/DPMTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:084/FIS/UNIKS/VIII/2026 Tanggal 13 AGUSTUS 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	MIFTA HULJANNAH
NIM	:	220411046
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN STRUKTURAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PADA DESA JAKE)"
Untuk melakukan Penelitian di	:	1. DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2.KANTOR DESA JAKE KEC. KUANTAN TENGAH KAB. KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA JAKE

Jalan Soekarno – Hatta, Nomor.58 Teluk Kuantan Kode Pos: 29362 Pos-el : desajake430@gmail.com



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 603 / JK / VIII / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BETTI LIZER**
Jabatan : Sekretaris Desa Jake
Instansi : Kantor Kepala Desa Jake

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MIFTA HULJANNAH**
NPM : 220411046
Program Studi : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah melaksanakan penelitian di Desa Jake tanggal 20 Agustus 2026 dengan judul :
**"EVALUSAI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN STRUKTURAL OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PADA DESA
JAKE)"**

Dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan telah menyelesaikan kegiatan
penelitian sesuai dengan izin penelitian yang diberikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Jake
Pada Tanggal : 20 Agustus 2026

An. KEPALA DESA JAKE
SEKRETARIS DESA JAKE



Betti Lizer



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MIFTA HULJANNAH
NPM : 220411046
DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. Dr.DESRIADI,S.Sos.,M.Si
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si
JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
STRUKTURAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PADA DESA JAKE)

Mulai Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	27/2020 8	Surat reaction Skripsi Penulisan Kesimpulan dikurangi: Abstrak Biodata (data riwayat hidup) Indikator (margin)		A	
		Kesimpulan diganti Jangan Optimal tetapi (baik, kurang, baik, cukup baik)			
2.	27/8 2020	RCC			

[illegible]



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Mifta Huljannah**
NPM : 220411046
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake).

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 13 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.Ip.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Mifta Huljannah**

NPM : 220411046

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Struktural Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Desa Jake).

Hari/Tgl Ujian : Senin / 14 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mifta Huljannah
Tempat/Tanggal Lahir : Jake, 07 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Jake



Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 023 Kebun Nenas
2. SMP Negeri 6 Teluk Kuantan
3. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 13 Juni 2026

Mifta Huljannah
NPM.220411046